

KPK GELAR BIMBINGAN TEKNIS DI SLEMAN

Cegah Korupsi Dimulai dari Lingkungan Keluarga

SLEMAN (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas bersama Pemkab Sleman di sebuah hotel, Selasa, (17/10). Mengangkat tema 'Membangun Keluarga Berintegritas, Kita Wujudkan Sleman Sebagai Rumah Bersama', kegiatan ini bermaksud memberantas perilaku korupsi dari lingkup yang paling kecil yakni keluarga.

Kegiatan diikuti seluruh pejabat beserta suami/istri mulai dari Bupati Kustini, Wakil Bupati Danang Maharsa, Sekda Harda Kiswaya, Asisten Sekda, Staf Ahli, kepala OPD, Direktur BUMD, hingga Kepala Bagian Setda. Materi bimtek disampaikan oleh tiga narasumber yakni Brigjen Kumbul Kusdwijanto Sudjadi (Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK), Achmad Irsyad Darmawan (Spesialis Pembinaan Peran Serta Masyarakat), Firlana Ismayadin (Spesialis Pembinaan Peran Serta Ma-

syarakat).

Menurut Bupati, penyelenggaraan bimtek ini bertujuan meningkatkan kapabilitas suami-istri tentang pentingnya membangun keluarga yang berintegritas dan anti korupsi. "Dengan adanya bimtek ini harapannya dapat muncul kesadaran dari para pegawai di lingkungan Pemkab untuk menghindari korupsi. Korupsi bisa dimulai dari keluarga, namun sebaliknya keluarga juga mampu mencegah lahirnya perilaku korupsi," katanya.

Dijelaskan, kegiatan ini diadakan di Sleman setelah

mendapatkan surat dari KPK dan sesuai dengan instruksi Gubernur DIY bahwa Kabupaten Sleman harus mengadakan Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas dengan melibatkan seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Sleman. Ke depannya, kegiatan ini juga akan menyasar lurah-lurah di Kabupaten Sleman. "Dengan bimbingan teknis ini kita akan sadar bersama pejabat harus berhati-hati saat bertindak," tutur Bupati.

Sementara Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Brigjen Pol Kum-

bul Kusdwijanto Sudjadi mengingatkan, pemberantasan korupsi hingga akhirnya tidak selesai hanya dengan penegakan hukum. Ada tiga strategi menekan terjadinya korupsi, yang pertama melalui pendidikan dengan menanamkan nilai-nilai integritas. "Harapannya masyarakat tidak ingin, tidak mau, karena sudah tahu apa itu korupsi, dampak, dan sebagainya," ungkapnya.

Strategi yang kedua melakukakan kegiatan pencegahan dengan mendorong perbaikan sistem pelayanan oleh pengelola negara sehingga tidak lagi ada celah. Kemudian yang terakhir adalah dengan penegakan hukum yang dimaksudkan untuk memberikan efek jera.

Kumbul juga mengingatkan bahwa tiga strategi yang digambarkan KPK itu perlu



KR-Istimewa

Bupati Kustini didampingi Wabup Danang Maharsa dan Sekda Harda Kiswaya menyerahkan pakta integritas keluarga anti korupsi.

adanya peran serta masyarakat yakni melalui program Keluarga Berintegritas. Pasalnya, keluarga sendiri memiliki peran sentral dalam

menanggulangi terjadinya tindak korupsi. Berkaca pula pada kejadian korupsi di Indonesia dimana sebagian besar ada keterlibatan ang-

gota keluarga lain. "alau kita berbicara peran melawan korupsi yang kita perangi ada di hati kita masing-masing," katanya. **(Has)-f**

REALITAS DI INDONESIA

Kapitalisme Lebih Kuat dari Agama - Pancasila



KR-Fadmi Suswati

Yudi Latif sedang membedah buku 'Kapitalisme Religius'.

SLEMAN (KR) - Realitas di Indonesia menunjukkan kapitalisme lebih kuat dari agama dan Pancasila. Kapitalisme mengatur kehidupannya dan kapitalisme mereduksi Pancasila. Sehingga kapitalisme diganti mati pelan-pelan digantikan kapitalisme liberal.

Guru Besar Emiritus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof Dr Musa Asyarie mengemukakan hal tersebut dalam bedah buku 'Kapitalisme Religius' karya Suwardono Muhammad MA di Gd Sardjito UII Jl Kaliurang KM 14,5, Selasa (17/10). Seri Diskusi Peradaban Kapitalisme, Sosialisme dan Islam yang diselenggarakan UII juga menghadirkan pembedah 2, Yudi Latif PhD dan dibuka Rektor UII Prof Fathul Wahid PhD.

"Uang memang bukan

segala-galanya. Tapi segala-galanya diatur oleh uang," tandas Musa. Sehingga dengan nada tanya, mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga ini berkata, jika ada kapitalisme religius, apakah religius memiliki kekuatan untuk mengatur kapitalisme.

Musa bahkan menyebutkan, ekonomi syariah bisa dikatakan menjadi pemanis ekonomi liberal. "Meski dipahami bila kapitalisme religius bukanlah kapitalisme berbaju syariah semata," sebutnya. Sementara di dalam *money politics*, agama bisa menjadi transaksional dan bisa diatur kapitalisme

Peradaban Bergeser
Sementara mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif PhD mengingatkan akan kritik Weber terhadap Islam. Menurut Weber, umat Islam dan Islam memiliki prasyarat

yang cukup sebagai *engine* rohaniannya. Di dalam Islam begitu banyak ajaran etos kerja, perintah kerja keras, mengajak berfikir dan lainnya. "Banyak sekali, tidak kalah dengan *Protestan Ethic*. Sehingga Islam sejatinya memiliki prasyarat rohani untuk menjadi peradaban besar," katanya.

Hanya kelemahan Islam tidak mampu mencari kelembagaan atau institusi baru yang cocok zamannya. Ketika dunia sudah berkembang, sains teknologi sudah bicara 4.0 dan lainnya, Islam masih bertahan untuk menstabilkan institusi yang dulu ketika Islam pernah jaya di abad pertengahan. Dia merasa cukup dengan institusi lama. Padahal dunia global, kapitalisme global memerlukan system, tata kelola baru. Ssistem kontrak, *insurance*, korporasi dan lainnya.

"Islam telat mengantisipasi, perlunya sitem kelembagaan baru. Zaman sudah berkembang masih tetap berpegang teguh sistem pengelolaan sosial politik di abad pertengahan, katanya.

Karenanya, menurut Yudi, kita harus melakukan rekonstruksi dengan pendidikan, tata kelola baru dan dapat beradaptasi. Dalam rekonstruksi masa lalu tidak dilihat secara kronological tapi dengan pendekatan geneologi. **(Fsy)-f**

JELANG TAHAPAN PEMILU

Polda DIY Gelar Operasi Mantap Brata Progo

SLEMAN (KR) - Polda DIY menggelar apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata Progo 2023-2024 di halaman Stadion Maguwoharjo, Selasa (17/10). Apel dilaksanakan serentak untuk mengecek kesiapan personel maupun sarana prasarana Operasi Mantap Brata Progo 2023-2024.

Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan, membacakan amanat dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi titik penentu masa depan bangsa. "Untuk itu perlu partisipasi penuh seluruh komponen bangsa guna menyukseskan Pemilu

2024," ucapnya.

Untuk mengamankan pesta demokrasi itu, Polri telah menyiapkan 2.000 personel Brimob. Selain itu sebanyak 8.500 personel Dalam Nusanantara yang siap dimobilisasi kapan pun dan di manapun seluruh wilayah Indonesia. "Selain itu, Polri juga menggelar Operasi Nusanantara Cooling System 2023-2024 guna mengantisipasi polarisasi dengan dilengkapi Satgas Anti Money Politic serta Satgas Pemilu Damai," tambahnya.

Kapolda menyampaikan kepada personel untuk terus mapping potensi konflik sosial di wilayah masing-masing dan selesaikan hingga ke akar masalah. Terkait

tindak pidana Pemilu, Kapolda mengatakan, agar dilakukan koordinasi dan kolaborasi antarpilar sentra Gakkumdu, agar penyelesaian

annya dapat dilakukan secara profesional serta transparan sehingga mendapatkan legitimasi dari masyarakat. **(Ayu)-f**



KR-Dok Humas Polda DIY.

Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan mengecek personel.

LAPORAN RAPERDA DPRD KABUPATEN SLEMAN

Pariwisata Menguatkan Citra Kota Pendidikan dan Budaya



KR-Saifullah Nur Ichwan

Hj Sumaryantin SSos MA

SLEMAN (KR) - DPRD Kabupaten Sleman telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas perda No. 11 Tahun 20215 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025. Adanya Raperda ini harapannya keberadaan pariwisata untuk menguatkan citra sebagai kota pendidikan dan budaya di DIY.

Ketua Pansus Hj Sumaryantin SSos MA mengatakan, Yogyakarta

ini dikenal sebagai kota pendidikan dan kota budaya. Di sisi lain Yogyakarta, khususnya Kabupaten Sleman juga dikenal sebagai kota wisata karena banyak tempat wisata.

"Sebagai kota pendidikan, kota budaya dan kota wisata juga melekat di Yogyakarta. Bahkan di Sleman sendiri menjadi pusat pendidikan, serta banyaknya tempat wisata mulai wisata alam maupun wisata buatan," kata Sumaryatin, Selasa (17/10).

Dengan banyak tempat wisata ini, dewan berharap sektor pariwisata dapat mendukung sebagai kota pendidikan dan budaya. Harapannya masyarakat luar daerah nyaman menyekolahkan anaknya di Kabupaten Sleman. "Kami ingin keberadaan pariwisata itu bisa mendukung Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota budaya. Supaya orang tua menyekolahkan anaknya di sini tidak was-was," ucap anggota Fraksi PKS ini.

Kenapa hal itu perlu dilakukan, lanjut Atin sapaan akrabnya, jika dilihat jumlah kunjungan wisatawan ke Yogyakarta ini mayoritas anak-anak sekolah. Untuk itu perlu dikembangkan pariwisata ke arah pendidikan dan budaya. "Jadi tidak hanya wisatawan datang ke sini

jalan-jalan saja. Tapi wisatawan, khususnya anak-anak sekolah juga dapat mendapatkan ilmu pengetahuan," ucapnya.

Kemudian dalam raperda itu juga akan mengatur kawasan wisata. Dengan adanya penataan tersebut, diharapkan nanti ada kawasan wisata berbasis pendidikan, budaya, minat khusus maupun tempat hiburan. "Supaya nanti untuk wisata berbasis pendidikan dan budaya disentralkan dimana saja. Kemudian tempat hiburan disentralkan di satu lokasi. Jangan sampai ada tempat hiburan tapi sampingnya pondok pesantren atau tempat ibadah," tuturnya.

Di samping itu, raperda ini nantinya juga akan menguatkan keberadaan pasar tradisional sebagai wisata belanja. Mengingat masih banyak pasar tradisional yang menjual makanan atau jajanan tradisional. Ketika dikemas dengan baik, hal itu dapat menarik wisatawan.

"Kami ingin pasar tradisional itu bisa menjadi tempat wisata belanja dengan menjual 'ndeso'-nya. Tapi harus tempat memperhatikan kebersihan pasar dan kehigenisan makanan. Supaya wisatawan tertarik untuk datang ke pasar tradisional," ujarnya. **(Sni)-f**

LEWATI 302 KABUPATEN/KOTA

Bendera Kirab Pemilu 2024 di Sleman



KR-Istimewa

Penyerahan bendera KPU di Pendapa Parasamya Sleman.

SLEMAN (KR) - Estafet bendera kirab Pemilu 2024 saat ini telah berada di Kabupaten Sleman. Bendera kirab Pemilu 2024 ini akan berada di Kabupaten Sleman selama enam hari ke depan, dan selanjutnya akan diserahkan kepada KPU Kota Yogyakarta.

KPU Sleman menerima estafet bendera kirab Pemilu dari KPU Kabupaten Klaten. Serah terima bendera kirab Pemilu 2024 dilakukan di Pendapa Parasamya Sleman, dan dihadiri Bupati Sleman Kustini.

Dalam kegiatan yang mengangkat tema 'Pemilu Sebagai Sarana Integrasi Bangsa' tersebut turut diarak 18 bendera partai pe-

serta Pemilu 2024. Sementara bendera yang diserahkan yakni bendera Merah Putih, pataka KPU, dan sebuah peti hitam KPU. Bendera kirab yang diterima oleh KPU Sleman tersebut merupakan bendera yang diberangkatkan dari Pontianak, Kalimantan Barat.

Menurut Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi, estafet kirab bendera ini merupakan bentuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar Pemilu 2024 dapat terlaksana dengan penuh kegebiraaan dan profesionalitas. "Ini juga sebagai sarana integrasi bangsa," ungkapnya.

Bupati Kustini menyambut gembira dengan diteri-

Sementara Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU RI Eberta Kawima menjelaskan, kegiatan ini sudah dimulai sejak 14 Februari 2023. Estafet bendera kirab Pemilu 2024 dimulai dari delapan tempat di Indonesia, yaitu KPU RI, KIP Aceh, KPU Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, KPU Provinsi Kalimantan Barat, KPU Provinsi Kalimantan Utara, KPU Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan KPU Provinsi Papua. Bendera tersebut melewati sebanyak 305 kabupaten/kota se-Indonesia, dan dijadwalkan finish di KPU RI pada bulan November.

(Has)-f



KR-Saifullah Nur Ichwan

Pansus sedang rapat dengan mitra kerja untuk membahas raperda rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Tahun 2015-2025.